

RENSTRA

(Rencana Strategis)
Tahun 2016-2021



**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUKABUMI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Sukabumi. Atas kasih sayang-Nya pula kami bisa menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di satuan kerja kami, yaitu Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi sebagai acuan atau panduan kerja selama 5 (lima) tahun kedepan, yakni Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.

Besar harapan kami bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Sukabumi menuju pembangunan yang lebih baik.

Sukabumi, Desember 2016

Kepala Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sukabumi



Drs. ASEP JAPAR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631110 199003 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.....	iii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II.....	6
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI.....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	6
2.1.1 Tugas dan Fungsi.....	7
2.1.2 Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.2.1 Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah.....	9
2.2.2 Sumber Daya Lainnya.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3.1 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12
2.3.2 Urusan Perdagangan.....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
BAB III.....	22
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
3.1.1 Koperasi dan UMKM	22
3.1.2 Perdagangan.....	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	41
BAB IV	44
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	44
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi.....	46
BAB V	48
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	48
5.1 Rencana Program dan Kegiatan	48
BAB VI.....	60
INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	60
BAB VII PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI.....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	6
2.1.1 Tugas dan Fungsi.....	7
2.1.2 Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.2.1 Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	9
Tabel 2.1	9
2.2.2 Sumber Daya Lainnya	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3.1 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12
2.3.2 Urusan Perdagangan	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
BAB III	
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
3.1.1 Koperasi dan UMKM.....	22
3.1.2 Perdagangan.....	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	41
BAB IV	
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	44
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi.....	46
BAB V	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	48
5.1 Rencana Program dan Kegiatan	48
BAB VI	
INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	60
BAB VII PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 telah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, adapun pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang terdiri dari serangkaian rencana kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) serta melibatkan peran serta aktif masyarakat selaku subyek maupun obyek pembangunan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pada aspek perencanaan pembangunan daerah, terjadi penataan kembali tahapan dan tatacara penyusunan dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah, pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, maka pesan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibidang perencanaan pembangunan daerah sangat jelas, bahwa perencanaan pembangunan yang disusun oleh seluruh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) selain dalam upaya untuk pencapaian target prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah dituangkan kedalam visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, juga merupakan penjabaran dari sasaran prioritas nasional dan program strategis nasional yang wajib diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan penegasan di atas, maka landasan yang memayungi penyerasian dan penyelarasan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, penyerasian antara prioritas nasional dengan prioritas daerah dan penyerasian antara target sasaran 5 (lima) tahunan nasional dengan 5 (lima) tahunan daerah, telah diatur dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamatkan, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari (i) rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan (ii) rencana perangkat daerah (Renstra PD dan Renja PD). Penjelasan lebih lanjut tentang tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah telah diatur dalam Pasal 264 ayat (3), bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Secara umum Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Renstra ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi yang disusun setiap tahun, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif ”;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam kurun waktu lima tahun.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Sukabumi.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2. Strategi dan Kebijakan

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI

Bab VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran yang strategis dan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam pengembangan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dikatakan strategis dan penting karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Koperasi merupakan kegiatan masyarakat yang perlu didukung sepenuhnya. Koperasi merupakan amanat UUD 1945, Pasal 33 ayat 1 yaitu menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
- b. Peranan UKM dalam perekonomian daerah sudah tidak diragukan lagi keberadaannya, UKM sendiri memiliki berbagai ciri kelemahan, namun begitu karena UKM menyangkut kepentingan rakyat/masyarakat banyak, maka pemerintah mendorong untuk mengembangkan dan melindungi UKM.

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah :

- Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.;
 - Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil;
 - Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja;
 - Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis;
 - Terdapatnya dinamisme managerial dan peranan kewirausahaan.
- c. Peran Perdagangan dalam perekonomian daerah, seperti telah dimaklumi bahwa perdagangan merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah, suatu daerah dikatakan maju perekonomiannya bisa dilihat dari aktivitas perdagangannya baik di toko-toko, warung-warung dan di pasar.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Keberadaan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, disusul dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi.

Tugas : Atas dasar Keputusan Bupati tersebut, tugas pokok Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi adalah: “membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah”.

Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang perdagangan dan tertib niaga; sarana prasarana distribusi perdagangan; bina koperasi; dan bina usaha mikro kecil; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang perdagangan dan tertib niaga; sarana prasarana distribusi perdagangan; bina koperasi; dan bina usaha mikro kecil; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- e. pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
- f. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;

- h. penerbitan/pemberian rekomendasi teknis perizinan di bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;
- i. pengawasan dan pengendalian pasca penerbitan/pemberian rekomendasi teknis perizinan di bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi di atur melalui Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Perdagangan dan Tertib Niaga membawahkan :
 - 1. Seksi Distribusi, Tertib Niaga dan Pemberdayaan Konsumen;
 - 2. Seksi Pengembangan Ekspor dan Promosi Perdagangan; dan
 - 3. Seksi Kemetrolgian
- d. Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
 - 2. Seksi Pembinaan, Pengelolaan dan Kerjasama Pemanfaatan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
 - 3. Seksi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan.
- e. Bidang Bina Koperasi membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;

2. Seksi Bina Lembaga Koperasi; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi..
- f. Bidang Bina Usaha Mikro Kecil, membawahkan :
1. Seksi Penguatan Kelembagaan, Data dan Informasi Usaha Mikro Kecil;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil; dan
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro Kecil
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, pada 31 Desember 2016 berjumlah 367 orang pegawai dengan status kepegawaian : 163 PNS, 46 Tenaga Kontrak Dinas dan 158 TKS.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	163	44,41
2	PTT	46	12,54
3	TKS	158	43,05
	Jumlah	367	100,00

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

No.	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	9	5,52
2	Golongan III	68	41,71
3	Golongan II	72	44,18
4	Golongan I	14	8,59
		163	100,00

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

Pendidikan	Pegawai			Jumlah	%
	PNS	PTT	TKS		
S2	14	-	-	14	3,81
S1	47	12	23	82	22,35
DIII	10	9	15	34	9,27
SLTA	79	14	77	170	46,33
SLTP	3	2	31	36	9,80
SD	10	9	12	31	8,44
Jumlah	163	46	158	367	100,00

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan struktural

No	Eselon	Jumlah Jabatan Tersedia	Jumlah Jabatan terisi
1	II b	1	1
2	III a	1	1
3	III b	4	4
4	IV a	24	32
5	IV b	8	8
	Jumlah	38	38

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Penjurangan

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan penjurangan

No	Pendidikan Penjurangan	Jumlah yang tersedia	Jumlah seharusnya berdasarkan jabatan terisi	Kurang
1	DIKPIM II	1	1	-
2	DIKPIM III	7	7	-
3	DIK PIM IV	17	43	26
	Jumlah	25	51	26

2.2.2 Sumber Daya Lainnya

Selain SDM yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yang tak kalah pentingnya adalah sumber daya perlengkapan. Secara umum perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sudah cukup memadai sarana mobilitas dari 4 (empat) bidang teknis sudah memiliki kendaraan operasional, sarana dan prasarana lainnya seperti gedung, peralatan kerja yang memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat.

Sesuai dengan urusan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, yang meliputi 2 (dua) urusan pemerintah yaitu, 1 (satu) urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan 1 (satu) urusan pilihan yaitu urusan Perdagangan. Masing-masing urusan memiliki layanan yang berbeda satu sama lain walaupun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dibawah ini diberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan urusan yang harus dilaksanakan :

2.3.1 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- Sosialisasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah;
- Melakukan penilaian kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam secara berkala sehingga diketahui tingkat kesehatannya;

- Fasilitasi pelaksanaan penilaian Koperasi berprestasi/ terbaik pada berbagai tingkatan;
- Fasilitasi pembiayaan dan Pengendalian kredit program dan dana bergulir;
- Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Keterampilan Terknis dan Manajemen bagi KUMKM;
- Mengikutsertakan KUMKM dalam berbagai kesempatan pameran/ promosi baik tingkat lokal, regional dan internasional;
- Pengembangan Pola – Pola Kemitraan;
- Pengawasan dan monitoring perkembangan kegiatan usaha KUMKM;
- Pengesahan Akta Pendirian Koperasi / Badan Hukum Koperasi;
- Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- Pembubaran / revitalisasi Koperasi;
- Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
- Kerjasama Dagang (MOU) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Pelayanan peningkatan kualitas kemasan produk KUMKM melalui Rumah Kemasan;
- Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP;
- Bimbingan pelaksanaan RAT Koperasi;
- Bimbingan penyusunan study kelayakan usaha;
- Fasilitasi legalitas usaha bagi KUMKM, sertifikat halal dan PIRT.

2.3.2 Urusan Perdagangan

- Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis dalam rangka pendirian usaha perdagangan;
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi;
- Pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;

- Pembinaan dan pengawasan, pemberian rekomendasi izin skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- Pengelolaan Operasional Pasar ;
- Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pasar;
- Pelayanan Penerbitan SHGP (Surat Hak Guna Pakai), SPBK (Surat Penempatan Blok Komoditas) dan Penarikan Retribusi;
- Pembinaan Pedagang di Pasar;
- Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
- Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;
- Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
- Pelayanan tera dan tera ulang UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah;
- Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) dan SI (Standar Internasional);
- Pembinaan operasional reparatir UTTP;
- Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal);
- Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor, diantaranya adalah : Identifikasi produk potensi ekspor untuk diikutsertakan pada promosi dagang/pameran, monitoring ekspor;
- Memberikan rekomendasi dalam rangka penerbitan API (Angka Pengenal Impor) ;
- Memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai tata cara ekspor;

Tabel 2.6
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Diskopperindag Tahun 2010 - 2015
Kabupaten Sukabumi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	SPM (Diskoperindag tidak memiliki SPM)																		
1.	Jumlah Koperasi yang berkinerja baik					2.50%	3%	3.50%	4%		4,29%	3,02%	23,46%	4%					
2	Jumlah UMKM yang berkembang dan berdaya saing					26.75%	27.50%	29%	30%		26.75%	27.50%	29%	30%					
3	Pendirian Lembaga Keuangan Mikro					1 LKM	0 LKM	1 LKM	0 LKM		1 LKM	0 LKM	0 LKM	0 LKM					
4	Kemitraan antara pengusaha besar dan UKM dalam pemenuhan kebutuhan lokal					220 MOU	230 MOU	240 MOU	250 MOU		220 MOU	230 MOU	240 MOU	250 MOU					
	Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	barang-barang strategis																		
	Sengketa konsumen yang diselesaikan					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%					
	Jumlah temuan Barang yang diawasi					14%	12%	10%	8%		14%	14%	16%	8%					
	tertera ulangnya alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)					40%	45%	50%	55%		40%	67%	58%	55%					
B	Nilai Ekspor tahun berjalan					US\$ 22.832.270	US\$ 21,745,019	US\$ 25,172,578	US\$ 26,431,207		US\$ 22.832.270	US\$ 198.42.890,36	US\$ 177.653.645	US\$ 212,318,225,11					
	Pasar Komoditas					0 Pasar	0 Pasar	1 Pasar	0 Pasar		0 Pasar	0 Pasar	0 Pasar	0 Pasar					
	Pasar Tradisional					2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar		2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar					
	Rehabilitasi Pasar Tradisional					1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar		1 Pasar	1 Pasar	5 Pasar	1 Pasar					
	Jumlah Produk IKM yang berkualitas					200 Produk	300 Produk	400 Produk	500 Produk		200 Produk	300 Produk	400 Produk	500 Produk					
C	IKM produktif					8,2%	8,3%	8,4%	8,5%		8,2%	8,3%	8,4%	8,5%					

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Diskoperindag Tahun 2010 - 2015
Kabupaten Sukabumi

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke- (juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (juta)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah	1.626.744	1.331.340	2.018.300	2.050.000	3.580.000	1.653.530	1.318.539	2.025.528	2.237.964	1.379.094	101.65	99.04	100.36	109.17	38.52		
- Hasil pajak daerah																	
- Hasil retribusi daerah	1.626.744	206.340	1.018.300	950.000	1.025.000	1.398.530	567.562	838.028	1.037.964	9185.24	85.97	275.06	82.30	109.26	89.61		
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Lain-lain PAD yang Sah		1.125.000	1.000.000	1.100.000	2.555.000	255.000	750.977	1.187.500	1.200.000	460.570	0	66.75	118.75	109.09	1.80		
Dana Perimbangan																	
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak																	
- Dana alokasi umum																	
- Dana alokasi khusus																	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah																	
- Pendapatan hibah																	
- Dana darurat																	
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																	
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus																	
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya																	
BELANJA DAERAH	23.531	25.715	29.196	29.664	27.224	22.250	24.910	28.511	29.253	26.676	94.56	96.87	97.65	98.61	97.99		
Belanja tidak langsung	8.122	8.950	9.273	9.637	11.019	8.018	8.593	9.085	9.465	10.731	98.72	96.01	97.97	98.22	97.39		
- Belanja pegawai	8.122	8.950	9.273	9.637	11.019	8.018	8.593	9.085	9.465	10.731	98.72	96.01	97.97	98.22	97.39		
- Belanja bunga																	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke- (juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (juta)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
- Belanja subsidi																	
- Belanja hibah																	
- Belanja bantuan sosial																	
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa																	
- Belanja tidak terduga																	
Belanja langsung	15.409	16.765	19.923	20.027	16.205	14.232	16.316	19.426	19.787	15.945	92.36	97.32	97.51	98.80	98.40		
- Belanja pegawai	2.488	2.587	3.587	3.157	2.598	2.385	2.570	3.470	3.144	2.540	95.86	99.34	9.67	99.59	9.78		
- Belanja barang dan jasa	4.866	8.689	10.505	10.914	9.614	4.788	8.565	10.191	10.705	9.451	98.40	98.57	97.01	98.09	98.30		
- Belanja modal	8.054	5.489	5.830	5.955	3.992	7.057	5.180	5.764	5.938	3.953	87.62	94.37	98.87	99.71	99.02		
PEMBIAYAAN																	
Penerimaan pembiayaan																	
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya																	
- Pencairan dana cadangan																	
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Penerimaan pinjaman daerah																	
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman																	
- Penerimaan piutang daerah																	
Pengeluaran pembiayaan																	
- Pembentukan dana cadangan																	
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah																	
- Pembayaran pokok utang																	
- Pemberian pinjaman daerah																	
Total																	

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Koperasi, UKM, dan Perdagangan adalah adanya pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) Tahun 2014 karena asimetris dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di pasar internasional.

Produk produk Koperasi dan UKM juga semakin terhimpit dengan masuk dan beredarnya produk impor ilegal, karena proses penegakan hukum tidak sepenuhnya berjalan efektif. Ditambah dengan berkembangnya bisnis retail oleh usaha besar di masyarakat, maka lengkaplah sudah tekanan persaingan yang dialami oleh produk produk Koperasi dan UKM.

Di sisi lain keberadaan Koperasi dan UKM membutuhkan kepastian tempat usaha. Dengan keterbatasan yang dimiliki, Koperasi dan UKM seringkali melakukan aktivitas usaha dengan lokasi yang tidak pasti dan berpindah-pindah. Sementara Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan, serta kadang mengabaikan upaya penataan kota yang secara dini memperhatikan ketersediaan tempat usaha bagi Koperasi dan UKM.

Sementara dalam rangka peningkatan kapasitas usaha terbentur oleh produk jasa lembaga keuangan yang sebagian besar berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih lama). Bagi Koperasi dan UKM keadaan ini akan mempersulit upaya peningkatan kapasitas usaha termasuk dalam rangka pengembangan produk-produk yang berdayasaing.

Permasalahan lain yang melilit Koperasi dan UKM adalah kurang kondusifnya iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum tuntasnya penanganan aspek Legatitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, kebijakan aspek informasi, kemitraan, pemberian kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan yang kurang mendukung, serta perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Eksistensi Koperasi, UKM juga

masih selalu di pandang sebelah mata, bahkan berkembang pandangan minor terhadap pemberdayaan Koperasi dan UKM seolah pemberdayaan adalah bagian dan program *charity* dan belas kasihan.

Permasalahan lain yaitu makin pesatnya perkembangan Pasar Modern dan Toko Modern dengan makin menjamurnya Mini market yang berpengaruh terhadap toko maupun warung-warung kecil sehingga persaingan usaha yang tinggi sementara pola kemitraan yang diatur tidak sepenuhnya menguntungkan bagi UKM.

Sesungguhnya upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM telah menemukan momentum yang tepat, yakni ditandai dengan tingginya komitmen dan dukungan politik serta peran masyarakat, Pemerintah Daerah dan Lembaga legislatif terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai pelaku utama dalam perekonomian domestik.

Prospek kemajuan juga terbuka lebar karena krisis ekonomi yang menimpa Indonesia hampir satu dasawarsa telah sepenuhnya pulih. Kondisi ini juga ditopang stabilitas politik dan keamanan yang relatif aman dan terjaga. Dengan demikian diharapkan akan makin meningkatkan daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat, serta jumlah penduduk yang sangat besar, berarti pasar dalam negeri akan berkembang lebih besar sehingga memberi peluang untuk menumbuhkan usaha domestik.

Selain itu, Koperasi dan UKM dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian daerah, mengingat kandungan impornya rendah, dan keterkaitan antar sektor relatif tinggi. Produk Koperasi dan UKM umumnya bergerak di sektor padat karya yang memerlukan investasi relatif rendah.

Seiring dengan itu, telah terjadi perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis, yang diharapkan akan dapat memacu dan meningkatkan produktivitas usaha dan investasi bagi usaha Koperasi dan UKM. Kondisi ini diharapkan akan memacu peluang bagi usaha Koperasi dan UKM terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri, dan industri-industri lainnya sebagai pelaku sub kontraktor yang kuat dan efisien bagi usaha besar.

Demikian pula dukungan perubahan orientasi kebijakan investasi, perdagangan dan industri ke arah industri pedesaan dan industri yang berbasis sumber daya alam terutama pertanian, kehutanan, kelautan, pertambangan dan pariwisata serta kerajinan rakyat memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya Koperasi, UKM, Industri Kecil Menengah. Di bidang permodalan, pengembangan potensi masih terbuka luas, untuk menjadikan LKM (lembaga Keuangan Mikro) sebagai kekuatan pembiayaan bagi usaha mikro. Selain telah disalurkannya skema kredit dan Pemerintah, juga tersedia plafon kredit yang besar di lembaga keuangan bank dan non bank.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Koperasi dan UMKM

Keterbatasan KUMKM dalam mengakses peningkatan kapasitas SDM, terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif (pembiayaan, Pasar, Teknologi, Informasi dan Legalitas Usaha), rendahnya jiwa kewirausahaan dan Kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (*best practices*) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan KUMKM di Kab. Sukabumi.

Karenanya banyak KUMKM yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi modern sebagaimana layaknya sebuah usaha. Selain itu, koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/keompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip koperasi.

Isu Strategis

- Daya saing KUKM yang masih rendah dan belum memiliki daya tawar usaha;

3.1.2 Perdagangan

a. Kebutuhan pokok masyarakat

Secara umum di Kabupaten Sukabumi, stabilitas harga bahan pangan dan kecukupan pasokan periode 2010-2015 sempat terkendala oleh berbagai gejolak seperti bencana dan krisis pangan dunia. Harga bahan-bahan pangan mengalami kenaikan yang fluktuatif, namun secara umum harga dan kecukupan pasokan bahan pangan dapat dikendalikan.

1. **Beras:** Sepanjang tahun 2010-2015, harga beras di Kabupaten Sukabumi relatif terjaga stabilitasnya. Lonjakan harga beras hanya terjadi pada saat pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2014.
2. **Gula:** Sepanjang tahun 2010–2015, di saat harga gula dunia bergejolak, harga gula di dalam negeri termasuk di Sukabumi relatif stabil. Stabilitas harga gula ini tidak terlepas dari peningkatan produksi gula dalam negeri dan terjaganya kecukupan pasokan.
3. **Minyak goreng:** Gejolak harga dan pasokan minyak goreng di dalam negeri termasuk di Sukabumi ketika harga minyak kelapa sawit internasional mengalami kenaikan tajam (dua kali lipat). Kenaikan harga minyak kelapa sawit dunia ini sempat mengakibatkan kelangkaan pasokan minyak kelapa sawit di dalam negeri, yang memicu peningkatan harga minyak goreng. Antisipasi yang dilakukan pemerintah antara lain melalui penyaluran minyak goreng bersubsidi.
4. **Kedelai:** Kenaikan harga kedelai dalam negeri di tingkat eceran mengalami kenaikan seiring dengan naiknya harga kedelai dunia. Pada periode tersebut harga berkisar antara Rp 4.500- 8.500 per kg. Peningkatan harga kedelai yang tajam terjadi di tahun 2013, yaitu sebesar Rp 10.666 per kg dari Rp 9.484 per kg di tahun 2013. Tahun 2014, harga kedelai relatif stabil, meskipun masih cukup tinggi, yaitu pada kisaran harga Rp 9.000- 10.000 per kg,.Antisipasi yang dilakukan pemerintah antara lain melalui penyaluran kedelai bersubsidi khusus bagi UKM produsen tahu dan tempe.

Isu Strategis

- Belum optimalnya pengendalian kebutuhan pokok masyarakat.

b. Kemetrollogian

Dalam upaya peningkatan pelayanan kemetrollogian di Kabupaten Sukabumi telah ditambah sarana dan prasarana operasional kemetrollogian berupa kendaraan khusus kemetrollogian 1 (satu) unit, alat-alat ukur UTTP 18 (delapan belas) jenis dan alat timbangan elektronik 2 (dua) unit. Pelaksanaan tera/tera ulang dilaksanakan secara berkala di 24 kecamatan. Kedepan bisa ditingkatkan lagi sehingga bisa mencakup seluruh kecamatan.

Isu Strategis

- Masih terdapat barang beredar diluar ketentuan;
- Tuntutan masyarakat terhadap jaminan tertib ukur (kemetrollogian).

c. Pengembangan ekspor

Jumlah nilai perdagangan ekspor non migas di Kabupaten Sukabumi s/d Tahun 2016 mencapai kurang lebih 212.318.225,11 US dolar. Perkembangan ekspor diharapkan masih bisa ditingkatkan dengan promosi produk unggulan daerah yang terus menerus digenjut baik di tingkat nasional maupun internasional.

Isu Strategis

- Belum terkelolanya potensi eksport dengan baik;

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Menyadari pentingnya peran pasar rakyat dalam perekonomian daerah, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi telah melakukan berbagai upaya untuk lebih memberdayakan pasar rakyat. Upaya-upaya ini antara lain: perbaikan dan peningkatan fisik dan manajemen pasar; penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, pembangunan pasar desa dan kecamatan.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan sarana perdagangan terutama pasar setiap tahun selalu meningkat dan pasar-pasar yang ada secara bertahap harus ditingkatkan kapasitasnya.

Isu Strategis

- Masih minimnya sarana prasarana perdagangan;

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN KOPERASI UKM					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya Kinerja Koperasi ▪ Rendahnya daya saing UMKM ▪ Rendahnya Penumbuhan Wirausaha baru 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kegiatan pemberdayaan ekonomi oleh Koperasi ▪ Meningkatnya tingkat pengembalian kredit Koperasi . ▪ Meningkatkan jumlah KUKM yang sehat, berkembang, dan berdaya saing ▪ Kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan local ▪ Penumbuhan Wirausaha baru 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah ▪ Jml koperasi berkinerja baik dibagi Jml Kop aktif X 100% ▪ Jumlah Koperasi Aktif dibagi Jml Seluruh Koperasi X 100% ▪ Jml UMKM yg terlegalisasi /Jumlah UKM Binaan x 100 % ▪ Jml UMKM yang terfasilitasi permodalan sd thn berjalan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personal/pelaksana tentang Koperasi dan UKM ▪ Optimalisasi penggunaan anggaran; Fasilitasi dan Mediasi secara optimal sebagai penunjang peningkatan dan pengembangan Koperasi dan UKM; 	<p>keterampilan dan motivasi usaha bagi Koperasi dan UMKM</p>	<p>Daya saing KUKM yang masih rendah dan belum memiliki daya tawar usaha;</p>

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasa lahan Pelayan an PD
			INTERNAL (KEWENANG AN SKPD)	EKSTERN AL (DILUAR KEWEN ANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PERDAGANGAN					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat dan barang-barang strategis ▪ Kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok ▪ Kurangnya Promosi produk unggulan daerah dan sosialisasi kebijakan ekspor; ▪ Tuntutan masyarakat terhadap jaminan tertib ukur (kemetrologia n) ▪ Masih terdapat barang beredar diluar ketentuan; ▪ Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang strategis. ▪ Pengawasan barang beredar Tertera langnya alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) ▪ Kurangnya promosi produk unggulan daerah dan sosialisasi kebijakan ekspor ▪ Masih terdapat kecamatan dan desa yang belum memiliki sarana perdagangan (pasar) yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ perbandingan antara jumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan jumlah ketersediaan kebutuhan pokok di pasar. ▪ jumlah temuan dibagi jumlah barang/ jasa yang diawasi ▪ perbandingan jumlah UTTP yang ditera / tera ulang dengan Jumlah seluruh UTTP ▪ Nilai Capaian ekpor Tahun berjalan ▪ jumlah pasar Rakyat yang akan dibangun dan direhab pada tahun berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kinerja penguatan sistem logistik daerah ▪ penyusunan dan penyempurna an kebijakan terkait kemetrologia n, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kemet rologian, ▪ Kebijakan Penerbitan SKA ▪ Fasilitasi dan mediasi pembanguan Pasar 	<p>Peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang pengembang an logistik Daerah,</p> <p>Kebijakan Pemerintah Pusat/Provi nsi dalam Penerbitan SKA</p> <p>Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana perdaganga n</p>	<p>Masih kurangnya kesadaran , pengetahuan, kepedulia n, kemampuan dan kemandiri an konsumen untuk melindung i dirinya serta menumbu hkan sikap pelaku usaha yang bertangu ngjawab</p> <p>Masih belum optimalnya pelaksana an prosedur dan tata cara ekspor Masih kurangnya sarana dan prasarana perdagang an yang belum tersebar secara merata;</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;			
	Terdapat 4 (empat) Program, yang ada kaitan langsung dengan DPKUKM, yaitu:			
1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Masih belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan. Masih kurangnya Pemberdayaan dan perkembangnya Kelembagaan Koperasi.	Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian; dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Masih belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keunggulan Usaha Kecil Menengah yang kompetitif dan Penciptaan wirausaha baru.	Masih belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keunggulan Usaha Kecil Menengah yang kompetitif dan Penciptaan wirausaha baru.	Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Masih belum optimalnya pelaksanaan prosedur dan tata cara ekspor;	Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam	Undang_undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Visi: “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masih lemahnya Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang-barang penting; Masih kurangnya SDM dan alat-alat kemetrolagian yang sesuai standar.	rangka peningkatan efisiensi perdagangan dan Ekspor	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Ekspor
4	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Masih kurangnya sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata;	Keterbatasan Kemampuan anggaran serta sarana penunjang yang ada	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Tabel 3.3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota*)	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Koperasi yang berkinerja baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Koperasi di Jawa Barat telah memiliki badan hukum; ▪ Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki koperasi 	Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi	Pembinaan/ pengawasan dan Pengendalian kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota*)	Sasaran pada Renstra K/L
		unggulan di tingkat nasional.		
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah UMKM yang berkembang, berdaya saing yang terlegalisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kontribusi KUMKM terhadap PDRB Jawa Barat. ▪ Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki klinik bisnis/inkubator bisnis; 	Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi	Pembinaan/pengawasan dan Pengendalian kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemitraan antara pengusaha besar dan UKM dalam pemenuhan kebutuhan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh KUMKM Kabupaten dan Kota se Jawa Barat memiliki jaringan terhadap lembaga permodalan . ▪ Peningkatan kontribusi KUMKM terhadap PDRB Jawa Barat. 	Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi	Pembinaan/pengawasan dan Pengendalian kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang strategis ▪ tertera ulangnya alat Ukur, Takar, Timbang dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penciptaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan meminimasi disparitas harga antar daerah di Jawa Barat; ▪ peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat ▪ peningkatan jenis dan jumlah alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya ▪ Meningkatnya nilai ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan akses informasi ▪ pasar baik harga maupun ketersediaan dalam penunjang pemenuhan kebutuhan dasar/pokok

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota*)	Sasaran pada Renstra K/L
	Perlengkapannya (UTTP) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Ekspor tahun berjalan ▪ jumlah temuan barang yang diawasi 	jenis dan jumlah alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan nilai dan volume ekspor 	kabupaten sukabumi <ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan dan optimalisasi perlindungan konsumen ▪ peningkatan jenis dan jumlah alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya ▪ Peningkatan Produk Ekspor daerah dan mempromosikan produk Daerah
4.	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangunan pasar rakyat ▪ peningkatan pasar rakyat ▪ pengembangan pasar rakyat 	tersedianya sarana perdagangan	tersedianya sarana perdagangan	Terfasilitasi sarana perekonomian masyarakat

Tabel 3.4
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota
terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

Visi: “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;			
	Terdapat ... Program, Tetapi Program yang ada kaitan langsung dengan Diskoperindag terdapat 5 program, yaitu:			
1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Masih belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan. Masih kurangnya Pemeberdayaan dan perkembangnya Kelembagaan Koperasi.	Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian; dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Masih belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keunggulan Usaha Kecil Menengah yang kompetitif dan Penciptaan wirausaha baru.	Masih belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keunggulan Usaha Kecil Menengah yang kompetitif dan Penciptaan wirausaha baru.	Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Masih belum optimalnya pelaksanaan prosedur dan tata cara ekspor; Masih lemahnya Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang-barang penting; Masih kurangnya SDM dan alat-alat kemetrolagian yang sesuai standar.	Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan dan Ekspor	Undang_undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangann Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Ekspor
4	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Masih kurangnya sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata;	Keterbatasan Kemampuan anggaran serta sarana penunjang yang ada	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Tabel. 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten berdasarkan Sasaran
Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembinaan/ pengawasan dan Pengendalian kelembagaan Koperasi Usaha Mikro kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) • Masih belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keunggulan Usaha Kecil Menengah yang kompetitif dan Penciptaan wirausaha baru. • Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi 	Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan dan masih kurang berkembangnya UKM yang ada	Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian; Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 3	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses informasi pasar baik harga maupun ketersediaan dalam penunjang pemenuhan kebutuhan dasar/ pokok peningkatan jenis dan jumlah alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya Peningkatan Produk Ekspor daerah dan mempromosikan produk Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Masih belum optimalnya pelaksanaan prosedur dan tata cara ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan dan perlindungan konsumen kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya (Ekspor maupun impor) 	<p>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Dan kebijakan Pemerintah kaitan dengan Perdagangan dan perlindungan Konsumen</p> <p>Tersedianya potensi usaha Ditunjang dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan maupun Tatacara ekspor maupun Impor</p>
4	Terfasilitasi sarana perdagangan	Masih kurangnya sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata;	Keterbatasan Kemampuan anggaran serta sarana penunjang yang ada	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra
SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memperkuat Kelembagaan Perekonomian Rakyat melalui penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi	Masih belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)	Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan dan masih kurang berkembangnya UKM yang ada	Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian; Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
2.	ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat Terlindunginya hak – hak konsumen peningkatan jenis dan jumlah alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya	Masih kurangnya kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.	Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan dan perlindungan konsumen	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Dan kebijakan Pemerintah kaitan dengan Perdagangan dan perlindungan Konsumen
3.	Meningkatnya nilai ekspor kabupaten sukabumi	Masih belum optimalnya pelaksanaan prosedur dan tata cara ekspor	kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan	Tersedianya potensi usaha Ditunjang dengan Peraturan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya (Ekspor maupun impor)	Menteri Perdagangan tentang ketentuan maupun Tatacara ekspor maupun Impor
4.	tersedianya sarana perdagangan	Masih kurangnya sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata;	Keterbatasan Kemampuan anggaran serta sarana penunjang yang ada	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah	Masih belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Industri Rumah Tangga kecil menengah	Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya	Tersedianya potensi usaha Industri ditunjang dengan Pasar yang memadai

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.7
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Sukabumi

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perwujudan Sistem Perkotaan				
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Terdapat Kawasan Peruntukan Sarana Perdagangan dan Jasa	Pembangunan Pasar Induk regional	Tersedianya sarana perdagangan	Kecamatan Palabuhanratu
2	Pusat Kajian Lokal (PKL)	Terdapat Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan Kluster industri berbasis pertanian (agro industrial cluster)	Mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah	Kec.Cibadak dan Kec.Sagaranten
		Terdapat Kawasan	Pembangunan fasilitas	Memperkuat Kelembagaan	Kec.Cibadak, Jampang

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peruntukan Sarana Perdagangan dan Jasa	jasa/perdagangan/keuangan	Perekonomian Rakyat melalui penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi	tengah, Jampang kulon, sagaranten
		Terdapat Kawasan Peruntukan Sarana Perdagangan dan Jasa	Pembangunan terminal agribisnis skala lokal	Tersedianya sarana perdagangan	Kec.Cibadak dan kec.sagaranten
		Terdapat Kawasan Peruntukan Sarana Perdagangan dan Jasa	Pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/atau pasar tipe C	Tersedianya sarana perdagangan	Kec.Cibadak
3	Pusat Pelayanan Kawasan (PKK)	Terdapat Kawasan Peruntukan Sarana Perdagangan dan Jasa	Pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/atau pasar tipe D	Tersedianya sarana perdagangan	Kec.Cicurug, Cisaat, Sukaraja, Surade
4.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Terdapat Kawasan Peruntukan Sarana Perdagangan dan Jasa	Pembangunan dan Peningkatan Pasar Kecamatan	Tersedianya sarana perdagangan	17 Kota Kecamatan di WP Utara dan 21 Kota Kecamatan di WP Selatan

Tabel 3.8
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perwujudan Kawasan Budidaya				
1	Penataan Struktur Industri	Terdapat Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan Kawasan Industri Ciambar	Mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah	Ke.Ciambar
		Terdapat Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan Sentra Industri	Mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah	Koridor Cicurug,- Cibadak-Cicantayan-Cisaat; koridor Sukarja – Sukalarang; Koridor Cikembar-Cikembang; dan kawasan Pada benghar Jampang tengah
		Terdapat Kawasan Peruntukan Industri	Peningkatan Kemitraan antar industri	Mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah	Kabupaten Sukabumi
2.	Penyediaan dan Pengembangan	Terdapat Kawasan Peruntukan Sarana	Pengembangan sarana perdagangan dan jasa dalam	Tersedianya sarana perdagangan	Kabupaten Sukabumi

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sarana Perdagangan	Perdagangan dan Jasa	rangka mendukung system perkotaan		
3	Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum	Terdapat Kawasan Peruntukan fasilitas social dan fasilitas umum	Pengembangan fasilitas perekonomian/Jasa	Memperkuat Kelembagaan Perekonomian Rakyat melalui penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperas	Kabupaten Sukabumi

Tabel 3.9
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Kabupaten Sukabumi

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa barat selatan	Peningkatan system pengolahan air limbah di perkotaan	Penataan kawasan Peruntukan sarana perdagangan dan jasa

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Penurunan kualitas lingkungan	Pengembangan prasarana limbah industri dikawasan Industri	Mengoptimalkan penentuan kawasan kegiatan industri bersyarat
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Pengembangan Sentra Industri	Mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah	Penentuan kawasan Peruntukan sarana perdagangan dan jasa
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pengembangan Kluster industri berbasis pertanian (agro industrial cluster)	Mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah	Mengoptimalkan penentuan kawasan kegiatan industri bersyarat
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Kawasan andalan sukabumi selatan, tetapi potensial menimbulkan masalah bersifat fisik lingkungan dan bencana alam	Pembangunan, penataan dan peningkatan sarana perdagangan	Penentuan kawasan Peruntukan sarana perdagangan dan jasa
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Pengembangan kawasan berbasis ekowisata (wisata ramah lingkungan)	Penyediaan sarana perdagangan dan Jasa	Penentuan kawasan Peruntukan sarana perdagangan dan jasa

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Tabel 3.10
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Dst...	Dst...	
	Total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 3.11
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah								
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	20	10	20	10	15			60
	▪ Rendahnya Kinerja Koperasi								
	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	20	10	20	10	15			70
	Rendahnya daya saing UMKM	20	10	20	10	15			70
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah								

	▪ Rendahnya penumbuhan wirausaha baru.								
2	Urusan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor								65
	▪ Ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat dan barang-barang strategis	20	10	20	10	5			65
	▪ Kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok	20	10	20	10	5			65
	Tuntutan masyarakat terhadap jaminan tertib ukur (kemetrolagian)	20	10	20	10	5			70
	Kurangnya promosi produk unggulan daerah dan sosialisasi kebijakan ekspor	20	10	20	10	10			70
	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	20	10	20	10	10			70
	Masih terdapat kecamatan dan desa yang belum memiliki sarana perdagangan (pasar) yang memadai	20	10	20	10	10			

Tabel 3.12
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		
	▪ Rendahnya Kinerja Koperasi	60	70
	▪ Rendahnya daya saing UMKM	70	70
	▪ Rendahnya penumbuhan wirausaha baru.	70	70

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
2	<p>Urusan Perdagangan</p> <p>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat dan barang-barang strategis ▪ Kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok ▪ Rendahnya kesadaran konsumen akan hak-hak dan kewajibannya ▪ Tuntutan masyarakat terhadap jaminan tertib ukur (kemetrolagian) <p>Program Pengembangan Ekspor Kurangnya promosi produk unggulan daerah dan sosialisasi kebijakan ekspor</p> <p>Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan Masih terdapat kecamatan dan desa yang belum memiliki sarana perdagangan (pasar) yang memadai</p>	<p>65</p> <p>65</p> <p>65</p> <p>70</p> <p>70</p> <p>70</p> <p>70</p>	<p>65</p> <p>65</p> <p>70</p> <p>70</p> <p>70</p> <p>70</p> <p>70</p>

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”

Misi : 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional

4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih menjadi dasar dalam mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan setiap perangkat daerah. Sebagaimana visi dan misi kepala daerah terpilih dimaksud maka Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi diamanatkan sesuai dengan Misi Pertama yaitu “Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan”.

Atas dasar tersebut maka tujuan pembangunan 2016-2021 pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi yaitu “*Meningkatkan Kemandirian ekonomi masyarakat dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Perdagangan*”. Dalam upaya pencapaian tujuan maka ditentukan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi
2. Ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat
3. Meningkatnya nilai ekspor Kabupaten Sukabumi
4. Meningkatnya sarana prasarana perdagangan

Keterkaitan tujuan, dan sasaran dengan target kinerja jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi sebagaimana tertuang dalam matrik sebagai berikut :

Tabel 4.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPKUKM

Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Eksist-ing (2015)	Target Kinerja Sasaran					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
						Target	Target	Target	Target	Target	Target
Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri											
Misi ke 1 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan											
<i>Meningkatkan Kemandirian ekonomi masyarakat dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Perdagangan</i>	1. Persentase UMKM yang berkembang, berdaya saing dan terlegalisasi	48%	1. Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi	1. Persentase koperasi yang berkinerja baik	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%
				2. Persentase UMKM yang berkembang, berdaya saing dan terlegalisasi	30%	33%	36%	39%	42%	45%	48%
				3. Jumlah MoU Kemitraan antara pengusaha besar dan UKM dalam pemenuhan kebutuhan lokal	250 MoU	265 MoU	280 MoU	295 MoU	310 MoU	325 MoU	340 MoU
	2. ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang penting	10 komoditas	2. Jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang terpantau	1. Jumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang penting	10 Komoditas	10 Komoditas	10 Komoditas	10 Komoditas	10 Komoditas	10 Komoditas	10 Komoditas
					3. Meningkatkan nilai ekspor Kabupaten Sukabumi	169	172	176	180	184	188
	3. Nilai ekspor tahun berjalan	191 juta US \$	3. Meningkatkan nilai ekspor Kabupaten Sukabumi	1. Nilai ekspor tahun berjalan (juta US\$)	169	172	176	180	184	188	191
				2. Jumlah temuan barang yang diawasi		75 %	70 %	65 %	60 %	55 %	50 %
				3. Prosentase tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)		20 %	23 %	26 %	29 %	34 %	44 %
	4. Meningkatnya Sarana dan prasarana perdagangan	57 Pasar	4. Meningkatnya sarana prasarana perdagangan	1. Jumlah pasar rakyat yang dibangun	2	3	2	2	2	2	2
				2. Jumlah Pasar Rakyat yang ditingkatkan	8	1	1	1	2	2	2
				3. Jumlah Pasar Rakyat yang dikembangkan	13	1	1	3	2	2	3

Dari matrik tujuan, dan sasaran jangka menengah tersebut, yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sukabumi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase koperasi yang berkinerja baik 2. Persentase UMKM yang berkembang, berdaya saing dan terlegalisasi 3. Jumlah MoU Kemitraan antara pengusaha besar dan UKM dalam pemenuhan kebutuhan lokal
2	Jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang terpantau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang penting
3	Meningkatnya nilai ekspor Kabupaten Sukabumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai ekspor tahun berjalan 2. Jumlah temuan barang yang diawasi 3. tertera ulangnya alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
4	Meningkatnya sarana prasarana perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pasar rakyat yang dibangun 2. Jumlah pasar rakyat yang ditingkatkan 3. Jumlah pasar rakyat yang dikembangkan

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang dalam bentuk strategi dan arah kebijakan sebagai mana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan Umum
<i>Meningkatkan Kemandirian ekonomi masyarakat dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Perdagangan</i>	1. Persentase UMKM yang berkembang, berdaya saing dan terlegalisasi	1. Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi	1. Persentase koperasi yang berkinerja baik	penataan pengelolaan koperasi dan UMKM	Pembinaan dan pelatihan pengelola koperasi
			2. Persentase UMKM yang berkembang, berdaya saing dan terlegalisasi		Pembinaan dan pelatihan pengelola UMKM
			3. Jumlah MoU Kemitraan antara pengusaha besar dan UKM dalam pemenuhan kebutuhan lokal		Kerjasama permodalan dengan Bank Pemerintah dalam pemberian modal kerja dan Kerjasama BUMD/ BUMD
	2. ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang penting	2. Ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat	1. Jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang terpantau	Menjaga stabilitas dan distribusi kebutuhan barang-barang penting	Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang-barang penting
	3. Nilai ekspor tahun berjalan	3. Meningkatnya nilai ekspor Kabupaten Sukabumi	1. Nilai ekspor tahun berjalan (juta US\$)	Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pembinaan, promosi dan fasilitasi yang mendorong potensi ekspor
			2. Jumlah temuan barang yang diawasi		Pengawasan barang -barang beredar
			3. Tertera ulangnya alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)		Peningkatan SDM dan alat-alat kemetrolgian yang sesuai standar
	4. Meningkatnya Sarana dan prasarana perdagangan	4. Meningkatnya sarana prasarana perdagangan	1. Jumlah pasar rakyat yang dibangun	Penyediaan sarana perdagangan	Pembangunan Pasar rakyat yang mampu bersaing dengan pasar modern
			2. Jumlah Pasar Rakyat yang ditingkatkan		Peningkatan layanan pasar rakyat
			3. Jumlah Pasar Rakyat yang dikembangkan		Peningkatan fasilitas pasar rakyat

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

i. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan :

- Penataan Kelembagaan Koperasi;
- Pengembangan Usaha Koperasi;
- Peningkatan Akses Pemberdayaan Koperasi dan KSP/USP;
- Peringatan Hari Koperasi;
- Sinergitas Dekoppinda Terhadap Pemberdayaan Koperasi.

ii. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kegiatan :

- Penataan Kelembagaan UMKM;
- Pengembangan Usaha UMKM Yang Berkembang dan Berdayasaing;
- Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM dan Kemitraan Antara Pengusaha Besar dan UKM Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lokal;
- Peningkatan Kapasitas UMKM;
- Sinergitas PLUT KUMKM Dalam Pemberdayaan UMKM;
- Penataan Sentra UKM.

iii. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Pengembangan
Eksport

Kegiatan :

- Monitoring Harga Bahan Kebutuhan Masyarakat;
- Monitoring Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
- Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah/Tera Ulang Alat UTTP;
- Pembinaan Toko Modern;
- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Promosi Produk Unggulan;
- Peningkatan Daya Saing Perdagangan Luar Negeri.

iv. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Kegiatan :

- Pembangunan dan Rehabilitasi pasar;
- Peningkatan sarana dan prasarana pasar;
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi

Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Penjelasan	Sat	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja														Kondisi akhir kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
		Pelayanan Administrasi Kepegawaian																			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pengadaan Mebeulair																			
		Pengadaan Perangkat																			

Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Penjelasan	Sat	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja														Kondisi akhir kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)		
		Komputer																			
		Pembangun an Gedung Kantor																			
		Pemeliharaa n Rutin/Berkal a AC																			
		Pemeliharaa n Rutin/Berkal a Gedung Kantor																			
		Pemeliharaa n Rutin/Berkal a Kendaraan Operasional /Dinas																			
		Penataan Halaman Kantor																			
Program Peningka		Pengadaan Pakaian																			

Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Penjelasan	Sat	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja														Kondisi akhir kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)		
tan Disiplin Aparatur		Khusus Hari Tertentu																			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur																			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Laporan Kinerja		Penyusunan Dokumen Perencanaan Keunagan																			
		Penyusunan Laporan Capaian																			

Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Penjelasan	Sat	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja														Kondisi akhir kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)		
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
		Penyusunan Laporan Keuangan																			
		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan																			
		Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai																			
		Peningkatan Sistem Informasi Pelaporan																			
Program Peningkatan Kualitas	Jumlah Koperasi yang berkinerj	Pengembangan Usaha Koperasi	Jml koperasi berkinerja baik dibagi	%	15	16	3,000	17	3,000	18	3,000	19	3,000	20	3,000	21	3,000	21	18,000		

Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Penjelasan	Sat	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja														Kondisi akhir kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)		
Kelembagaan Koperasi	a baik		Jml Kop aktif X 100%																		
		Penataan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif dibagi Jml Seluruh Koperasi X 100%	%	25	25.5	2,000	26	2,000	26.5	2,000	27	2,000	27.5	2,000	28	2,000	28.0	12,000		
		Sinergitas Dekopinda dalam Pemberdayaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif dibagi Jml Seluruh Koperasi X 100%	%	25	25.5	2,000	26	2,000	26.5	2,000	27	2,000	27.5	2,000	28	2,000	28.0	12,000		
		Peningkatan Akses pembiayaan Koperasi dan pengembangan KSP/USP	Jumlah Koperasi Aktif dibagi Jml Seluruh Koperasi X 100%	%	25	25.5	2,000	26	2,000	26.5	2,000	27	2,000	27.5	2,000	28	2,000	28.0	12,000		

Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Penjelasan	Sat	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja														Kondisi akhir kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)		
		Peringatan Hari Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif dibagi Jml Seluruh Koperasi X 100%	%	25	25.5	2,000	26	2,000	26.5	2,000	27	2,000	27.5	2,000	28	2,000	28.0	12,000		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-Jumlah UMKM yang berkembang dan berdayasaing -Kemitraan antara pengusaha besar dan	Penataan Kelembagaan UKM	Jml UMKM yg Berkinerja Baik /Jumlah UKM Binaan	%	30	33	3,000	36	3,000	39	3,000	42	3,000	45	3,000	48	3,000	48	18,000		
		Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM dan Kemitraan Antara Pengusaha Besar dan	Jml UMKM yg Berkinerja Baik /Jumlah UKM Binaan	% MO U	30 250	33 265	3,000 2000	36 280	3,000 2000	39 295	3,000 2000	42 310	3,000 2000	45 325	3,000 2000	48 340	3,000 2000	48 1815	18,000 12000		

Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Penjelasan	Sat	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja														Kondisi akhir kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)		
	UKM dalam pemenuhan kebutuhan local	UMKM																			
		Peningkatan Kapasitas UMKM	Jml UMKM yg Berkinerja Baik /Jumlah UKM Binaan	%	30	33	3,000	36	3,000	39	3,000	42	3,000	45	3,000	48	3,000	48	18,000		
		Sinergitas PLUT KUMKM Dalam Pemberdayaan UMKM	Jml UMKM yg Berkinerja Baik /Jumlah UKM Binaan	%	30	33	3,000	36	3,000	39	3,000	42	3,000	45	3,000	48	3,000	48	18,000		
		Penataan Sentra UKM	Jml UMKM yg Berkinerja Baik /Jumlah UKM Binaan	%	30	33	3,000	36	3,000	39	3,000	42	3,000	45	3,000	48	3,000	48	18,000		
		Pengembangan																			

Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Penjelasan	Sat	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja														Kondisi akhir kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)		
		gan UMKM Melalui PIK																			
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	-Nilai Ekspor tahun berjalan -Terjaminsnya keterseediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang penting -Nilai Ekspor tahun berjalan -jumlah temuan		cukup jelas	US \$	169,000,000	17,000,000	250,000	17,000,000	275,000	18,000,000	300,000	18,000,000	325,000	18,000,000	350,000	19,000,000	375,000	195,000,000	1,875,000		
		Monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat	Komoditas kebutuhan pokok masyarakat	Komoditas	10	10	2,500	10	2,500	10	2,500	10	2500	10	2500	10	2500	60	15,000		
		Monitoring Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	jumlah temuan dibagi jumlah barang/jasa yang diawasi x 100 %	%	80	75	1,500	70	1,500	65	1,500	60	1,500	55	1,500	50	1,500	50	9,000		
		Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologi	perbandingan jumlah UTTP yang	%	18	20	1,000	23	8,000	26	10,000	29	2,500	34	2,500	44	2,500	44	26,500		

Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Penjelasan	Sat	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja														Kondisi akhir kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)		
	barang yang diawasi -tertera ulangny a alat Ukur, Takar, Timban g dan Perleng kapanny a (UTTP)	an Daerah/ Tera ulang UTTP	ditera / tera ulang dengan Jumlah seluruh UTTP																		
		Pembinaan Toko Modern	jumlah temuan dibagi jumlah barang/ jasa yang diawasi x 100 %	%	80	75	1,500	70	1,500	65	1,500	60	1,500	55	1,500	50	1,500	50	9,000		
		Pengawasa n dan Pendataan Peredaran barang dan jasa (Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	jumlah temuan dibagi jumlah barang/ jasa yang diawasi x 100 %	%	80	75	1,500	70	1,500	65	1,500	60	1,500	55	1,500	50	1,500	50	9,000		

Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Penjelasan	Sat	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja														Kondisi akhir kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)		
		Peningkatan Daya Saing Perdagangan Luar Negeri	cukup jelas	US \$	169,000,000	17,000,000	750	17,600,000	825	18,000,000	900	18,400,000	975	18,800,000	1,050	19,100,000	1,125	1,090,000	5,625		
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																			
		Promosi Produk Unggulan																			
program penyedia sarana dan prasarana perdagangan	- pemba ngunan pasar rakyat - Peningkatan Pasar Rakyat - Penge mbang	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	jumlah pasar rakyat yang akan dibangun pada tahun berjalan	pas ar	2	3	5,000	2	4,500	2	4,500	2	4,500	2	4,500	2	4,500	13	27,500		
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah																			

Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Penjelasan	Sat	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja														Kondisi akhir kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)		
	an Pasar Rakyat	Pembangunan dan Rehabilitasi pasar	jumlah pasar rakyat yang akan di tingkatkan pada tahun berjalan	pas ar	8	1	5,000	1	5,000	1	5,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	9	45,000		
			jumlah pasar rakyat yang akan di rehabilitasi pada tahun berjalan	pas ar	13	1	1,000	1	1,000	3	3,000	2	2,000	2	2,000	3	3,000	12	12,000		

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
SUKABUMI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Koperasi yang berkinerja baik	16%	17%	18%	19%	20%	21%	21%
2	Persentase UMKM yang berkembang dan berdaya saing dan terlegalisasi	33%	36%	39%	42%	45%	48%	48%
3	Jumlah MoU Kemitraan antara pengusaha besar dan UKM dalam pemenuhan kebutuhan lokal	265 MOU	280	295	310	325	340	340
4	Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang penting	10 komoditas	10	10	10	10	10	60

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Jumlah temuan barang yang diawasi	75	70	65	60	55	50	50%
6	tertera ulangya alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	20 %	23 %	26 %	29 %	34 %	44%	44%
7	Nilai Ekspor tahun berjalan	US\$172.000.000	176.000.000	180.000.000	184.000.000	188.000.000	192.000.000	192.000.000
8	Jumlah pasar rakyat yang dibangun	3 pasar	2	2	2	2	2	13 pasar
9	Jumlah Pasar Rakyat yang ditingkatkan	1 pasar	1	1	2	2	2	9 pasar
10	Jumlah Pasar Rakyat yang dikembangkan	1 pasar	1	3	2	2	3	12 pasar

BAB VII PENUTUP

Rencana Program Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ini merupakan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021. Tentu saja keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta pengembangan Sektor Perdagangan di Kabupaten Sukabumi. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

Oleh sebab itu pelaksanaan Renstra membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki ketenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Setanjutnya Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah periode 2016-2021 menjadi acuan kerja bersama bagi unit-unit pelaksana dilingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, UMKM, perdagangan sehingga dapat membawa kemajuan bagi Koperasi, UMKM, dan Perdagangan serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan, khususnya dan seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan Koperasi, UMKM, dan Perdagangan di Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi, Desember 2016

Kepala Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sukabumi



Drs. ASEP JAPAR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631110 199003 1 017